



PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional yang dilakukan secara baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025, perlu disesuaikan dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, asumsi keuangan daerah, serta kondisi terkini perangkat daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, perlu diubah untuk mengakomodir kebutuhan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
 - b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
 - c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
 - d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
 1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;

2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
 3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
 8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
 15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
 18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
 19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
 20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
 2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
 3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
 4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
 5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
 6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
 7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
 8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
 9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
 10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
 11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
 12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
 13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
 14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
 15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;

- 16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
- 17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.
- g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Juni 2025
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 26 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik

- Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
 - h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029;
 - i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Sekretariat DPRD. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama	Persen		63.481.146.727		10.940.985.162,0		17,24	
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	38.070.783.227	20	8.430.001.692	23,53	22,14	
X XX 01 201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	85	56.100.000	20	11.487.500	23,53	20,48	
X XX 01 201 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	28.050.000	2	6.660.000	40,00	23,74	
X XX 01 201 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	28.050.000	2	4.827.500	33,33	17,21	
X XX 01 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	85	6.568.218.453	20	1.568.735.537	23,53	23,88	
X XX 01 202 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	39	6.406.548.453	39	1.530.575.537	100,00	23,89	
X XX 01 202 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	133.620.000	3	31.545.000	25,00	23,61	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X XX 01 202 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	21	28.050.000	6	6.615.000	28,57	23,58	
X XX 01 205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	85	325.400.000	20	-	23,53	0,00	
X XX 01 205 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40	325.400.000	0	-	0,00	0,00	Dilaksanakan di TW 2
X XX 01 206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	85	1.984.629.838	20	144.902.500	23,53	7,30	
X XX 01 206 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	1.318.004.838	4	69.224.500	57,14	5,25	
X XX 01 206 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	38.330.000	1	9.390.500	50,00	24,50	
X XX 01 206 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	70.000.000	1	16.740.000	50,00	23,91	
X XX 01 206	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	140.000.000	3	34.687.500	25,00	24,78	
X XX 01 206 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	410.295.000	3	13.360.000	25,00	3,26	
X XX 01 206 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	8.000.000	3	1.500.000	25,00	18,75	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X XX 01 208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	85	1.749.728.160	20	368.158.001	23,53	21,04	
X XX 01 208 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	60.000.000	3	5.000.000	25,00	8,33	
X XX 01 208 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	15.000.000	3	3.886.155	25,00	25,91	
X XX 01 208 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	96.200.000	3	8.895.000	25,00	9,25	
X XX 01 208 03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	1.578.528.160	3	350.376.846	25,00	22,20	
X XX 01 209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	85	1.475.458.184	20	95.725.359	23,53	6,49	
X XX 01 209 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	442.474.850	1	33.122.150	25,00	7,49	
X XX 01 209 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	41	809.073.600	4	58.232.209	9,76	7,20	
X XX 01 209 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20.890.400	3	1.332.000	15,00	6,38	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X XX 01 209 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	203.019.334	1	3.039.000	16,67	1,50	
X XX 01 215	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persen	85	25.522.948.592	20	6.206.617.795	23,53	24,32	
X XX 01 215 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	45	25.023.928.592	45	6.205.737.795	100,00	24,80	
X XX 01 215 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	paket	5	431.520.000	0	-	0,00	0,00	Dilaksanakan di TW 2
X XX 01 215 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	orang	45	67.500.000	2	880.000	4,44	1,30	Tidak banyak anggota yg ambil
X XX 01 215 03	Layanan Administrasi DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD	Persen	85	388.300.000	20	34.375.000	23,53	8,85	
X XX 01 216 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12	388.300.000	3	34.375.000	25,00	8,85	
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Persen	88	25.410.363.500	20	2.510.983.470	22,73	9,88	
4 02 02 201	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persen	88	6.222.565.500	20	353.605.600	22,73	5,68	
4 02 02 201 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	6	2.640.934.000	0	205.460.600	0,00	7,78	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4 02 02 201 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	9	3.339.561.000	3	135.545.000	33,33	4,06	
4 02 02 201 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	dokumen	4	105.000.000	1	12.600.000	25,00	12,00	
4 02 02 201 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	dokumen	5	137.070.500	0	-	0,00	0,00	
4 02 02 202	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persen	88	3.485.152.000	0	277.637.100	0,00	7,97	
4 02 02 202 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	8	3.485.152.000	0	277.637.100	0,00	7,97	
4 02 02 203	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	88	4.380.118.000	20	276.604.250	22,73	6,31	
4 02 02 203 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	dokumen	16	4.380.118.000	2	276.604.250	12,50	6,31	
4 02 02 203 07	Peningkatan Kapasitas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen	88	4.194.171.000	20	515.451.220	22,73	12,29	
4 02 02 204 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	6	2.610.281.000	4	452.451.220	66,67	17,33	
4 02 02 204 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	orang	42	315.000.000	1	1.500.000	2,38	0,48	
4 02 02 204 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	orang	96	255.750.000	18	57.000.000	18,75	22,29	
4 02 02 204 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	dokumen	132	1.013.140.000	12	4.500.000	9,09	0,44	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4 02 02 205	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	Persen	88	1.739.237.500	20	507.435.000	22,73	29,18	
4 02 02 205 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	4	1.739.237.500	2	507.435.000	50,00	29,18	
4 02 02 206	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD	Persen	88	607.442.000	0	75.548.350	0,00	12,44	
4 02 02 206 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	1	607.442.000	0	75.548.350	0,00	12,44	
4 02 02 208	Fasilitasi Tugas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	Persen	88	4.781.677.500	20	504.701.950	22,73	10,55	
4 02 02 208 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	dokumen	20	2.985.924.000	2	148.407.000	10,00	4,97	
4 02 02 208 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	laporan	1	173.140.000	1	123.450.000	100,00	71,30	
4 02 02 208 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	dokumen	4	1.369.937.000	1	188.905.600	25,00	13,79	
4 02 02 208 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	dokumen	60	252.676.500	15	43.939.350	25,00	17,39	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Terlambatnya hasil harmonisasi dari Kementrian Hukum Kanwil DIY;
- b. Perubahan jadwal penyusunan Naskah Akademik Dilaksanakan di TW III dan IV.
- c. Beberapa Sub kegiatan yang sifatnya wajib dianggarkan seperti Medical Check Up DPRD masih rendah realisasinya karena tidak diambil oleh anggota.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPPA-BELANJA SKPD
KAB. BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025		
Nomor DPPA	DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
SKPD	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

[illegible]

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															FORMULIR DPPA-BELANJA SKPD														
KAB. BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025																													
Nomor DPPA		DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025																											
SKPD		4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah																											

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tid'k Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja T'd'k Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
	02	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp413.404.838,00	Rp904.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.318.004.838,00	Rp384.676.588,00	Rp904.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.289.276.588,00	)	2,23	
4	02	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp38.330.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.330.000,00	Rp58.942.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.942.700,00	Rp20.612.700,00	34,97	
4	02	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000.000,00	Rp0,00	0,00	
4	02	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp140.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.000.000,00	Rp140.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.000.000,00	Rp0,00	0,00	
4	02	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi	Kab. Bantul,		Rp410.295.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp410.295.000,00	Rp393.837.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp393.837.000,00	(Rp16.458.000,00)	(4,18)	
	02	01	2,06	0010					Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	0,00	
2.08 Pemerintahan Daerah									Rp1.749.728.160,00					Rp1.749.728.160,00					Rp0,00	0,00	
	02	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	0,00	
4	02	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa i b F Da a Kir d n kastiSj E	Dana Alokasi oAu)	Kab. Bantul, Bantul		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0,00	
4	02	01	2,08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp96.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.200.000,00	Rp96.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.200.000,00	Rp0,00	0,00	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR DPPA-BELANJA SKPD																			
KAB. BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025																													
Nomor DPPA		DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025																											
SKPD		4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah																											

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun												Bertambah / (Berkurang)						
								Sebelum					Setelah													
								1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tid'k Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja T'd'k Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	T+1					
4	02	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp1.578.528.160,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.578.528.160,00	Rp1.578.528.160,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.578.528.160,00	Rp0,00	0,00						
2.09 Urusan Pemerintahan Daerah									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Rp1475 458 184 00					Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.037.217.234,00		42,25						
			2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp442.474.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp442.474.850,00	Rp275.691.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp275.691.800,00	Rp166.783.050,00	60,50						
Urusan				Keg		Dana		1	Sebelum					Setelah									T+1			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%						
4	02	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi U (DAU)	Kab. Bantul, Bantul		Rp809.073.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp809.073.600,00	Rp537.615.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp537.615.700,00	Rp27'.457.900,00	50,49						
4	02	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp20.890.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.890.400,00	Rp20.890.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.890.400,00	Rp0,00	0,00						
4	02	01	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp203.019.334,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp203.019.334,00	Rp203.019.334,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp203.019.334,00	Rp0,00	0,00						
2.15									Rp25.522.948.592,00					Rp0,00					Rp0,00					Rp0,00		0,00
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD									Rp0,00					Rp0,00												
4	02	01	2,15	0001	Penyelenggaraan DdpRD i KeLJaFi g a i	Dana Alokasi umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp25.023.928.592,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.023.928.592,00	Rp25.023.928.592,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.023.928.592,00	Rp0,00	0,00						

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															FORMULIR DPPA-BELANJA SKPD														
KAB. BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025																													
Nomor DPPA		DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025																											
SKPD		4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah																											

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tid'k Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja T'd'k Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
4	02	01	2,15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp431.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp431.520.000,00	Rp431.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp431.520.000,00	Rp0,00	0,00	
4	02	01	2,15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp67.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.500.000,00	Rp67.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.500.000,00	Rp0,00	0,00	
2.16			Layanan Administrasi DPRD				Rp388.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp388.300.000,00	Rp358.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp358.300.000,00	(Rp30.000.000,00	(8,37)			
02		01	2,16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp388.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp388.300.000,00	Rp358.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp358.300.000,00	(Rp30.000.000,00	(8,37)	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD									Rp25.410.363.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.410.363.500,00	Rp16.263.455.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.263.455.500,00	Rp9.146.908.000,00	(56,24)	
02 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan 2.01 DPRD									Rp6.222.565.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.222.565.500,00	Rp3.255.988.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.255.988.500,00	Rp2.966.577.000,00	%	91,11
4	02	02	2,01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp2.640.934.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.640.934.000,00	Rp1.271.371.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.271.371.000,00	Rp1.369.563.000,00	(107,72)	
4	02	02	2,01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp3.339.561.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.339.561.000,00	Rp1.742.547.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.742.547.000,00	Rp1.597.014.000,00	9' .65	
4	02	02	2,01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp105.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp105.000.000,00	Rp105.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp105.000.000,00	Rp0,00	0,00	
4	02	02	2,01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Dana alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp137.070.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp137.070.500,00	Rp137.070.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp137.070.500,00	Rp0,00	0,00	
02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran									Rp3.485.152.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.485.152.000,00	Rp1.837.203.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.837.203.000,00		(89,70)	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												FORMULIR DPPA-BELANJA SKPD											
KAB. BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025																							
Nomor DPPA		DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025																					
SKPD		4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah																					

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)			
									Sebelum					Setelah							T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tid'k Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja T'd'k Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
4	02	02	2,02	0003	Pembahasan APBD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp3.485.152.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.485.152.000,00	Rp1.837.203.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.837.203.000,00	Rp1.647.949.000,00	(89,70)		
			2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					Rp4.380.118.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.380.118.000,00	Rp2.355.057.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.355.057.000,00		(85,99)		
	02	02	2,03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp4.380.118.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.380.118.000,00	Rp2.355.057.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.355.057.000,00	Rp2.025.061.000,00	(85,99)		
			02	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD					Rp4.194.171.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.194.171.000,00	Rp3.827.547.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.827.547.000,00	(	(9,58)	
4	02	02	2,04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp2.610.281.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.610.281.000,00	Rp2.346.221.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.346.221.000,00	(Rp264.060.000,00	(11,25)		
4	02	02	2,04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp315.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp315.000.000,00	Rp315.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp315.000.000,00	Rp0,00	% 0,00		
4	02	02	2,04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp255.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp255.750.000,00	Rp255.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp255.750.000,00	Rp0,00	0,00		
4	02	02	2,04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp1.013.140.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.013.140.000,00	Rp910.576.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp910.576.000,00	Rp102.564.000,00	' .26		
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					Rp1.739.237.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.739.237.500,00	Rp1.739.237.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.739.237.500,00	Rp0,00	0,00			
4	02	02	2,05	0003	Pelaksanaan Reses	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp1.739.237.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.739.237.500,00	Rp1.739.237.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.739.237.500,00	Rp0,00	0,00		
			02	2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					Rp607.442.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp607.442.000,00	Rp316.714.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp316.714.000,00	(	)	91,80

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR DPPA-BELANJA SKPD									
KAB. BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025																			
Nomor DPPA	DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025																		
SKPD	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah																		

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun										Bertambah / (Berkurang)			
								Sebelum					Setelah							T+1	
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tid'k Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja T'd'k Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
4	02	02	2,06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	1	Rp607.442.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp607.442.000,00	Rp316.714.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp316.714.000,00	(Rp290.728.000,00)	91,80	
2.08				Fasilitasi Tugas DPRD				Rp4.781.677.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.781.677.500,00	Rp2.931.708.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.931.708.500,00	)	63,10		
	02	02	2,08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp2.985.924.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.985.924.000,00	Rp1.924.923.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.924.923.000,00	)	55,12	
4	02	02	2,08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp173.140.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp173.140.000,00	Rp140.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.740.000,00	Rp32.400.000,00	23,02	
4	02	02	2,08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp1.369.937.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.369.937.000,00	Rp613.369.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp613.369.000,00	(Rp756.568.000,00)	% (123,35)	
4	02	02	2 08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp252.676.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.676.500,00	Rp252.676.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.676.500,00	Rp0,00	0,00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul, 



PRAPTA NUGRAHA, S.Sos., MH.
NIP. 197112171991011001